



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KONFERENSI TINGKAT TINGGI G20 DI INDIA

**Ziyad Falahi**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[ziyad.falahi@dpr.go.id](mailto:ziyad.falahi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, yang terjadi pada masa endemi dituntut untuk mampu menjadi mediasi dalam suasana perseteruan Rusia dan Ukraina. Namun beberapa media justru memberi penekanan tentang melunaknya negara G-20 pada invasi Rusia. G20 yang pada mulanya adalah sebagai perkumpulan yang berupaya mengakomodasi kepentingan negara selatan sering kali dikritik lantaran belum sepenuhnya fokus memperjuangkan kepentingan negara selatan. Banyak pihak berpandangan bahwa agenda selatan dalam G20 sulit diwujudkan karena hegemoni dari negara utara yang memiliki kekuatan lebih besar. Hal tersebut tampak dalam beberapa sesi KTT yang tidak lagi memiliki korelasi dengan agenda yang diperjuangkan dalam World Trade Organization (WTO).

Agresifitas dan dominasi Rusia yang menghasilkan upaya degradasi secara gradual pengaruh NATO idealnya menjadi kesempatan bagi negara G20 untuk mereposisi agenda kedepan. Negosiasi 200 jam yang cukup berliku sebagai respons atas invasi Rusia membuat agenda KTT menghasilkan 300 pertemuan bilateral dan 15 rancangan. Salah satu momen bersejarah yang mengharukan dari 83 paragraf adalah diterimanya Uni Afrika sebagai anggota G20, yang menjadi bukti komitmen G20 dalam mengakomodasi negara selatan.

Tidak berselang lama setelah G20, Presiden Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Kim Jong Un. Beberapa media mengulas pertemuan Rusia–Korea Utara yang dianggap lebih membahas mengenai senjata. Namun, pembicaraan keduanya sebagaimana yang diungkap oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia adalah sebuah upaya kunjungan bilateral biasa. Kunjungan tersebut sejatinya adalah respons atas pergeseran geopolitik dunia di mana munculnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian BRICS, soliditas G20, dan tren de-dolarisasi.

Dengan demikian, Indonesia semakin dituntut untuk berperan aktif melakukan harmonisasi program pembangunan untuk selatan selain langkah Presiden Jokowi yang merelakan ASEAN sebagai jangkar Indo Pasifik. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai hasil kajian Indonesia juga tidak dipaparkan dalam forum WTO berpotensi menjadi kekurangan mendasar dalam setiap upaya negara selatan dalam memperoleh kepentingan kolektif. Pernyataan Menlu Retno di media bahwa negara *global south* telah mampu menjadi navigator perlu dibuktikan dengan ekstensifikasi diplomasi *multitrack* yang fokus pada agenda mengatasi disparitas sosial antara utara dan selatan dengan melibatkan segenap komponen, termasuk parlemen.

Keterlibatan parlemen dianggap perlu dalam rangka menciptakan suasana rujuk yang diharapkan dapat terwujud di antara AS dan China. Pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden di Bali pada tahun 2022 yang membahas mengenai kembalinya ancaman kepemimpinan *dictatorship* yang merupakan bola panas dan perlu segera diselesaikan. Oleh

karena itu, keterlibatan parlemen dalam setiap perundingan adalah semangat demokratis yang sekiranya mampu diterima oleh China. Dengan optimalisasi *multitrack* hingga level parlemen, maka semangat *multistakeholder* yakni *no one left behind* dapat menjadi solusi moderat yang mampu menunjukkan di satu sisi peran politbiro China dan di sisi lain adalah semangat demokrasi yang masih populis.

## Atensi DPR RI

KTT G20 di India dengan dinamika dan kesepakatan yang dihasilkan menarik diketahui. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah dokumen konsensus mulai dari bergabungnya Uni Afrika ke dalam blok hingga soal carut marut perang Rusia dan Ukraina. Soal perang Rusia–Ukraina, G20 sepakat bahwa tidak ada satupun negara yang boleh merebut wilayah lain dengan paksa. Ini merupakan langkah lunak yang diambil G20 setelah pada tahun lalu mengutuk Rusia atas perang di Ukraina dan menuntut Kremlin angkat kaki dari negara tetangganya tersebut.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI khususnya melalui Komisi I, harus ikut mengawal dan memastikan agar berbagai kesepakatan yang dihasilkan KTT G20 di India, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara berkembang, dapat diimplementasikan dengan baik. DPR harus ikut mengawal dan memastikan, program kerja sama G20 diarahkan untuk berorientasi pada tindakan, dimana keprihatinan pembangunan di negara-negara selatan dapat disuarakan secara aktif. Melalui diplomasi parlemen di forum P20, DPR RI harus juga menyuarakan hal tersebut.

## Sumber

cnn.indonesia.com, 12 September 2023;  
*Jakarta Post*, 12 September 2023;  
*Kompas*, 12 September 2023;  
*Rakyat Merdeka*, 14 September 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023